

ABSTRAK

Sejauh ini, banyak undang-undang yang mengatur perbankan syariah di Indonesia. Beberapa peraturan bank di Indonesia yang mengatur perbankan syariah yang tertuang, seperti Perbankan Syariah, fatwa DSN-MUI, PSAK Syariah, serta PAPSI. Bisa ada praktik dan standar akuntansi syariah yang berbeda muncul jika tidak ada standar global untuk akuntansi syariah. Perbankan syariah menghadapi tantangan, di mana masih adanya penelitian-penelitian yang mengindikasikan bahwa belum sepenuhnya pelaksanaan akuntansi dan ekonomi syariah, ditambah dengan naiknya minat umat muslim Indonesia untuk menggunakan jasa perbankan syariah. Beberapa faktor ini menguatkan argumen untuk terpenuhinya standar akuntansi syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan pengaruh dari indeks likuiditas, profitabilitas, leverage, komite audit, komisaris independen, dan dewan pengawas syariah terhadap kepatuhan Syariah bank Syariah di Indonesia. Indeks kepatuhan syariah terdiri dari delapan indikator: pengungkapan Dewan Pengawas Syariah (DPS), Akad Mudharabah, Murabahah, Musyarakah, Akad Ijarah, Akad Qardh, Zakad, dan Istishna. Studi ini akan menyelidiki semua bank umum syariah yang ada di Indonesia, dan sampelnya akan diambil dengan metode purposive sampling. Data dikumpulkan dari laporan tahunan bank umum syariah 2017–2021. Analisis data dilakukan menggunakan uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis dengan metode regresi linier berganda. Pengelolaan data yang ada diproses menggunakan program SPSS. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel komite audit memiliki dampak yang signifikan terhadap indeks kepatuhan syariah. Sementara itu, variabel likuiditas, profitabilitas, leverage, dewan pengawas syariah dan komisaris independen tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap indeks kepatuhan syariah.

Kata Kunci: Indeks Kepatuhan Syariah, Likuiditas, Profitabilitas, Leverage, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, Komisaris Independen

ABSTRACT

So far, there are many laws governing Islamic banking in Indonesia. Several bank regulations in Indonesia that regulate Islamic banking are stated, such as Sharia Banking, DSN-MUI fatwas, Sharia PSAK, and PAPSI. There can be different Islamic accounting practices and standards emerging if there is no global standard for Islamic accounting. Islamic banking faces challenges, where there are still studies that indicate that the implementation of Islamic accounting and economics is not perfect, coupled with the increasing interest of Indonesian Muslims to use Islamic banking services. These few factors strengthen the argument for the fulfillment of Islamic accounting standards. The purpose of this study is to show the effect of liquidity index, profitability, leverage, audit committee, independent commissioner, and sharia supervisory board on Sharia compliance of Islamic banks in Indonesia. The sharia compliance index consists of eight indicators: disclosure of the Sharia Supervisory Board (DPS), Akad Mudharabah, Murabahah, Musharakah, Akad Ijarah, Akad Qardh, Zakad, and Istishna. This study will investigate all Islamic commercial banks in Indonesia, and samples will be taken by purposive sampling method. Data was collected from the annual report of Islamic commercial banks 2017–2021. Data analysis was performed using classical assumption testing and hypothesis testing with multiple linear regression methods. Management of existing data is processed using the SPSS program. The results of the research that have been conducted show that audit committee variables have a significant impact on the sharia compliance index. Meanwhile, the variables of liquidity, profitability, leverage, sharia supervisory board and independent commissioners did not have a significant impact on the sharia compliance index.

Keywords: *Sharia Compliance Index, Liquidity, Profitability, Leverage, Sharia Supervisory Board, Audit Committee, Independent Commissioner*

